

## *Discourse Analysis of Substantive Democracy in Anies Baswedan's Dialogue with UGM Students*

### **Analisis Diskursus Demokrasi Substansial dalam Dialog Anies Baswedan dengan Mahasiswa UGM**

**Rizki Fauzan Yusuf**

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [rizkifauzanyusuf@gmail.com](mailto:rizkifauzanyusuf@gmail.com)

##### **Keyword:**

*Substantive Democracy; Discourse Analysis; Civil Society; Public Participation; Institutional Reform.*

##### **Kata Kunci:**

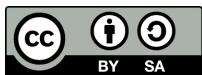
Demokrasi Substantif; Analisis Wacana; Masyarakat Sipil; Partisipasi Publik; Reformasi Institusional.

#### **Abstract**

*This study analyzes the dialogue between Anies Baswedan and Universitas Gadjah Mada students as a microcosm of Indonesia's post-Reformasi democratic paradox. Employing Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis, the research examines three discourse dimensions: textual structure, social cognition, and social context. Primary data from the dialogue transcript were analyzed to identify core themes: institutional crisis (KPK and Constitutional Court), youth economic justice and welfare, identity-based political polarization, and quality of civic space and meaningful public participation. Findings reveal that student questions act as a civil society "watchdog" mechanism, demanding a shift from procedural to substantive democracy. The politician's responses expose tensions between procedural rhetoric and substantive needs, reflecting challenges in institutional reform, welfare distribution, social cohesion, and civil liberties. The paper underscores the role of youth as democratic change agents and recommends more meaningful participation channels to strengthen Indonesia's democratic legitimacy.*

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dialog antara Anies Baswedan dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai cerminan paradoks demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis model Teun A. van Dijk, studi ini menelaah tiga dimensi wacana: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Data primer berupa transkrip dialog dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama, yaitu krisis institusional (KPK dan MK), keadilan ekonomi dan kesejahteraan generasi muda, polarisasi politik identitas, serta kualitas ruang sipil dan partisipasi publik bermakna. Hasil menunjukkan bahwa pertanyaan mahasiswa berfungsi sebagai mekanisme watchdog masyarakat sipil, menuntut pergeseran dari demokrasi prosedural menuju substantif. Respons politisi mengungkap ketegangan antara retorika prosedural dan kebutuhan substantif, mencerminkan tantangan reformasi institusional, distribusi kesejahteraan, kohesi sosial, dan kebebasan sipil. Artikel ini menegaskan peran generasi muda sebagai agen perubahan demokrasi dan merekomendasikan saluran partisipasi yang lebih bermakna untuk memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perjalanan Indonesia pasca-Reformasi 1998 sering kali dinarasikan sebagai sebuah kisah paradoks. Di satu sisi, negara ini secara luas diakui sebagai salah satu keberhasilan transisi demokrasi, menjelma menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia dan yang terbesar di kalangan negara mayoritas Muslim [1]. Fondasi demokrasi prosedural telah berhasil diletakkan dengan kokoh: pemilihan umum yang kompetitif dan multipartai diselenggarakan secara reguler sejak 1999, menandai pergeseran fundamental dari rezim otoriter Orde Baru [2]. Tingkat partisipasi pemilih yang secara konsisten tinggi, mencapai lebih dari 80% pada Pemilu 2019, sering disebut sebagai bukti vitalitas demokrasi elektoral di tingkat akar rumput. Amandemen konstitusi telah mentransformasi lanskap politik, memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung, memperkuat parlemen, dan menjamin hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi dan berserikat [3]. Keberhasilan dalam membangun dan menjalankan mesin prosedural demokrasi ini merupakan sebuah pencapaian historis yang tidak dapat diremehkan, terutama mengingat kompleksitas geografis dan demografis Indonesia [4].

Namun, di sisi lain, perayaan atas keberhasilan prosedural ini semakin dibayangi oleh "kegelisahan" atau kecemasan yang mendalam mengenai kualitas, substansi, dan arah masa depan demokrasi itu sendiri. Sejumlah cendekiawan dan lembaga pemantau demokrasi menunjuk pada gejala-gejala stagnasi demokrasi, bahkan kemunduran (*democratic backsliding*) dalam dekade terakhir [5]. Kegelisahan ini berakar pada defisit substantif yang kian nyata. Politik klientelisme dan oligarki, yang merupakan warisan dari era sebelumnya, tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dan mengakar kuat dalam institusi-institusi demokrasi yang baru [4]. Akibatnya, diskursus politik sering kali terperangkap pada level elite, terputus dari aspirasi dan kepentingan riil masyarakat luas, yang mendambakan perbaikan kesejahteraan dan keadilan. Lebih jauh lagi, pilar-pilar utama akuntabilitas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga peradilan, dan kebebasan pers mengalami pelemahan sistematis, baik melalui revisi legislatif yang kontroversial maupun intervensi politik. Fenomena ini menciptakan sebuah demokrasi yang, meskipun secara formal berfungsi, terasa hampa dan gagal memenuhi janji-janji substantif Reformasi.

Dalam konteks inilah, dialog antara tokoh politik Anies Baswedan dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi sebuah peristiwa yang signifikan secara analitis. Jauh dari sekadar acara kampanye atau forum akademik biasa, interaksi ini dapat dilihat sebagai sebuah mikrokosmos yang merefleksikan paradoks demokrasi Indonesia. Dialog tersebut menjadi arena di mana elite politik, yang merupakan bagian dari sistem yang ada, dihadapkan secara langsung oleh segmen kunci masyarakat sipil yaitu kaum muda terdidik. Kelompok ini, yang tumbuh dewasa di era demokrasi, menunjukkan kepedulian yang semakin besar terhadap hasil-hasil substantif ketimbang sekadar ritual prosedural. Interaksi ini bukan hanya pertukaran gagasan, melainkan sebuah situs deliberasi demokratis di mana visi-visi yang saling bersaing mengenai masa depan bangsa diperdebatkan dan ditantang secara terbuka.



Gambar 1. Foto Anies Baswedan Saat Menyampaikan Materi

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=WfwU-RwhXKc>

Pentingnya forum semacam ini justru diperkuat oleh kegagalan institusi formal. Ketika lembaga-lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering dianggap lebih sebagai perpanjangan tangan eksekutif atau arena bagi kepentingan elite ketimbang sebagai pengawas yang efektif, dan ketika lembaga pengawas seperti KPK otoritasnya sengaja dilemahkan, maka terjadi sebuah "vakum akuntabilitas". Kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara ini pun terkikis. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil secara alamiah akan mencari arena-arena alternatif untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh lembaga formal.

Oleh karena itu, dialog di UGM melampaui nilai nominalnya sebagai sesi tanya jawab. Ia bertransformasi menjadi sebuah "sidang parlemen pengganti" atau "audit publik", di mana mahasiswa, bertindak sebagai proksi bagi publik yang peduli, secara langsung menantang seorang pemimpin politik mengenai isu-isu paling mendesak yang dihadapi negara. Hal ini mengangkat signifikansi peristiwa tersebut dari sekadar diskusi akademik menjadi sebuah tindakan kontestasi demokrasi yang krusial. Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa analisis diskursus terhadap dialog tersebut dapat mengungkap ketegangan-ketegangan fundamental yang membentuk lintasan demokrasi Indonesia saat ini.

## **2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana tema-tema yang didiskusikan dalam dialog tersebut mencerminkan perdebatan akademis dan publik yang lebih luas mengenai defisit demokrasi di Indonesia? (2) Dengan cara apa pertanyaan-pertanyaan mahasiswa berfungsi sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil, yang menuntut pergeseran dari kepedulian prosedural ke kepedulian demokrasi substantif? (3) Apa yang diungkapkan oleh respons sang politisi mengenai cara pandang elite dalam membingkai tantangan-tantangan ini dan solusi yang mereka tawarkan? Melalui penelaahan ini, dialog di UGM tidak hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa tunggal, tetapi sebagai sebuah cermin yang merefleksikan pertarungan gagasan yang lebih besar tentang makna dan tujuan demokrasi di Indonesia abad ke-21.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis diskursus kritis (*Critical Discourse Analysis*) model Teun A. van Dijk untuk mengkaji dialog antara Anies Baswedan dan mahasiswa UGM. Pendekatan analisis diskursus kritis van Dijk dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap struktur kekuasaan, ideologi, dan dinamika sosial yang tersembunyi dalam wacana politik melalui tiga dimensi analisis yang saling terkait: dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks menganalisis struktur makro (tema global), superstruktur (skema teks), dan mikrostruktur (unsur kebahasaan) dari dialog tersebut. Dimensi kognisi sosial meneliti bagaimana mental model dan representasi kognitif aktor politik membentuk produksi dan interpretasi diskursus. Sementara dimensi konteks sosial mengkaji bagaimana wacana yang berkembang terkait dengan isu-isu yang sedang bergulir dalam masyarakat dan struktur kekuasaan yang ada. Data primer berupa rekaman video dialog dan

transkrip percakapan dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan pilihan kata, strategi retorik, dan pola argumentasi yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tema-tema demokrasi substantif dikonstruksi, dinegosiasikan, dan diperdebatkan dalam arena diskursus politik tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Konseptual: Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Substansial**

Untuk menganalisis secara mendalam dinamika yang terungkap dalam dialog di UGM, diperlukan sebuah kerangka konseptual yang mampu membedakan antara bentuk dan isi dari demokrasi. Kerangka ini berpusat pada dikotomi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial, serta menempatkan masyarakat sipil sebagai aktor kunci yang mendorong transisi dari satu bentuk ke bentuk lainnya.

Perdebatan mengenai kualitas demokrasi sering kali berpusat pada dua pendekatan utama. Demokrasi Prosedural, yang juga dikenal sebagai pendekatan minimalis, berfokus pada *mekanisme* dan *institusi* formal yang memungkinkan terselenggaranya pemerintahan demokratis. Indikator utamanya meliputi penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala; hak pilih universal; keberadaan sistem multipartai yang kompetitif; serta jaminan formal atas kebebasan sipil dan politik. Dalam kerangka ini, sebuah negara dianggap demokratis jika telah memenuhi prosedur-prosedur standar tersebut. Frasa terkenal dari Abraham Lincoln, "pemerintahan dari rakyat" dan "oleh rakyat," secara esensial merujuk pada aspek prosedural ini [3]. Perjalanan Indonesia pasca-1998 adalah contoh klasik dari upaya memprioritaskan pembangunan demokrasi prosedural. Reformasi konstitusional dan legislatif secara besar-besaran diarahkan untuk menciptakan institusi-institusi ini, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen hingga sistem pemilu yang lebih representatif.

Di sisi lain, Demokrasi Substansial, atau pendekatan maksimalis, melampaui sekadar prosedur dan memusatkan perhatian pada *kualitas, hasil, dan tujuan akhir* dari pemerintahan. Pendekatan ini mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam: Apakah sistem demokrasi tersebut benar-benar melayani kepentingan rakyat? Frasa "untuk rakyat" dari Lincoln menangkap esensi dari demokrasi substansial. Indikatornya tidak hanya terbatas pada hak-hak politik, tetapi juga mencakup hak-hak sosial dan ekonomi. Kualitas demokrasi substansial diukur dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan

sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, menegakkan supremasi hukum (*rule of law*) secara konsisten bagi semua warga negara, melindungi kelompok minoritas, memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembuatan kebijakan, dan menjamin akuntabilitas pejabat publik. Kritik yang paling sering dilontarkan terhadap demokrasi Indonesia kontemporer adalah bahwa ia telah berhasil secara prosedural, namun belum sepenuhnya "berhijrah" menuju demokrasi yang substantif.

Kegagalan untuk menjembatani kesenjangan antara janji prosedural dan realitas substantif ini menjadi sumber utama ketidakpuasan publik dan instabilitas politik. Ketika sebuah negara telah berhasil mengimplementasikan demokrasi prosedural dengan menyelenggarakan pemilu secara rutin selama lebih dari dua dekade, secara alamiah publik akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap perbaikan nyata dalam kehidupan mereka yaitu pemenuhan janji-janji substantif seperti kesejahteraan dan keadilan. Namun, ketika isu-isu fundamental seperti korupsi yang merajalela, ketidaksetaraan yang tajam, dan penegakan hukum yang tebang pilih terus berlanjut, jurang antara harapan dan kenyataan ini melebar. Kesenjangan ini menciptakan lahan subur bagi frustrasi dan sinisme publik [6].

Dalam kondisi seperti inilah, aktor-aktor politik populis dapat memobilisasi ketidakpuasan tersebut, bukan dengan menawarkan solusi kebijakan yang konkret, tetapi dengan mengarahkan kemarahan publik pada target-target identitas (agama, etnis, atau ideologi). Mereka membingkai lawan politik sebagai penyebab kemerosotan moral dan ekonomi bangsa, sehingga mengalihkan perdebatan dari substansi ke sentiment [7]. Dengan demikian, polarisasi politik yang tajam, yang menjadi ciri khas pemilu-pemilu Indonesia belakangan ini, bukanlah sebuah fenomena yang berdiri sendiri. Ia memiliki akar kausal yang dalam pada kegagalan sistem politik untuk bertransisi dari demokrasi yang sekadar prosedural menjadi demokrasi yang memberikan manfaat substantif yang dirasakan oleh warganya.

**Tabel 1. Perbandingan Dimensi Demokrasi Prosedural dan Substansial di Indonesia**

<b>Dimensi</b>	<b>Fokus Utama</b>	<b>Indikator Kunci</b>	<b>Manifestasi di Indonesia</b>
Demokrasi Prosedural	Mekanisme & Institusi Pemerintahan	1. Pemilu reguler, bebas, dan adil 2. Sistem multipartai 3. Hak pilih universal 4. Kebebasan pers &	1. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu serentak sejak 1999 2. Sistem presidensial dengan pemilihan langsung

Dimensi	Fokus Utama	Indikator Kunci	Manifestasi di Indonesia
Demokrasi Substansial	Kualitas & Hasil Pemerintahan	berserikat (formal)	3. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi 4. Lanskap media beragam formal
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supremasi hukum (Rule of Law) yang efektif</li> <li>2. Akuntabilitas pejabat publik</li> <li>3. Partisipasi publik yang bermakna</li> <li>4. Keadilan sosial dan ekonomi</li> <li>5. Perlindungan hak-hak minoritas &amp; kebebasan sipil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stagnasi pemberantasan korupsi &amp; pelemahan KPK</li> <li>2. Penegakan hukum yang tebang pilih &amp; politisasi yudikatif</li> <li>3. Menguatnya politik transaksional dan klientelisme</li> <li>4. Polarisasi sosial berbasis identitas yang tajam</li> <li>5. Penyusutan ruang gerak masyarakat sipil</li> </ol>

Dalam kerangka ini, masyarakat sipil (*civil society*) memegang peran sentral sebagai katalisator yang mendorong evolusi menuju demokrasi substansial. Masyarakat sipil, yang didefinisikan sebagai ruang asosiasi sukarela di luar negara dan pasar, menjalankan beberapa fungsi krusial [8]. Pertama, ia berfungsi sebagai "anjing penjaga" (*watchdog*) yang membatasi dan mengawasi kekuasaan negara. Organisasi masyarakat sipil (OMS) memantau kebijakan pemerintah, mengungkap praktik korupsi, dan menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik [9]. Kedua, masyarakat sipil merupakan arena untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang lebih dalam, seperti toleransi, moderasi, kompromi, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan, yang esensial bagi stabilitas demokrasi jangka panjang.

Ketiga, dan yang paling relevan untuk analisis ini, masyarakat sipil menyediakan saluran bagi partisipasi publik yang bermakna. Ketika institusi formal gagal menyerap aspirasi publik, OMS, kelompok mahasiswa, dan gerakan sosial menjadi corong bagi suara-suara yang terpinggirkan, melobi untuk kebijakan yang lebih adil, dan memastikan bahwa proses politik tidak didominasi sepenuhnya oleh elite. Dalam konteks ini, mahasiswa universitas sering kali bertindak sebagai garda depan intelektual dalam masyarakat sipil. Dengan kapasitas analitis dan idealisme mereka, mereka mampu mengartikulasikan kritik yang cangkih terhadap sistem dan memobilisasi tekanan untuk perubahan [10]. Dialog di UGM, oleh karena itu, harus dipahami sebagai manifestasi dari

peran masyarakat sipil ini, di mana mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai audiens pasif, tetapi sebagai agen aktif yang menuntut substansi dan akuntabilitas.

Terakhir, kerangka konseptual ini juga bersinggungan dengan teori-teori reformasi institusional dalam negara-negara demokrasi transisional. Teori-teori ini menekankan bahwa untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi dan substantif, tidak cukup hanya dengan menciptakan institusi-institusi baru di atas kertas. Diperlukan sebuah proses reformasi yang mendalam untuk membongkar struktur, praktik, dan ideologi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu (atau korupsi dan klientelisme di masa kini) [11]. Upaya ini mencakup reformasi di sektor keamanan (militer dan polisi), peradilan, dan birokrasi, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Tuntutan untuk mereformasi KPK, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga penegak hukum lainnya yang muncul dalam diskursus publik di Indonesia, dan kemungkinan besar dalam dialog di UGM, adalah cerminan dari kesadaran bahwa tanpa reformasi institusional yang sejati, demokrasi prosedural akan tetap rapuh dan substansinya akan terus tergerus.

## **2. Analisis Diskursus Dialog: Arena Kontestasi Visi dan Realitas Politik**

Bagian ini merupakan inti dari analisis, di mana dialog antara Anies Baswedan dan mahasiswa UGM dibedah secara tematis. Analisis ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi benar atau salahnya argumen yang disampaikan, melainkan untuk mengidentifikasi bagaimana diskursus yang terjadi merefleksikan, menantang, dan menegosiasikan isu-isu fundamental dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Dialog ini diposisikan sebagai sebuah arena di mana narasi elite politik bertemu dengan tuntutan kritis dari masyarakat sipil. Untuk memandu analisis, pemetaan tematik diskursus disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Pemetaan Tematik Diskursus dalam Dialog UGM**

<b>Tema Analitis</b>	<b>Pertanyaan Kunci (Hipotetis)</b>	<b>Problem Substansial yang Mendasari</b>
<b>Pelemahan Institusi Demokrasi</b>	"Bagaimana Bapak akan mengembalikan independensi dan wibawa KPK serta Mahkamah Konstitusi yang kini diragukan publik pasca-revisi UU dan putusan kontroversial?"	Supremasi Hukum (Rule of Law), Akuntabilitas, Pemberantasan Korupsi Sistemik, Checks and Balances.
<b>Keadilan Ekonomi &amp; Kesejahteraan</b>	"Di tengah bonus demografi, banyak anak muda menghadapi kesulitan mencari kerja dan ketimpangan	Keadilan Distributif, Pembangunan Inklusif, Kualitas Sumber Daya



	ekonomi. Apa langkah konkret Bapak untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi kesenjangan?"	Manusia, Sosial.	Kontrak
<b>Polarisasi &amp; Politik Identitas</b>	"Indonesia masih terbelah tajam pasca-pemilu sebelumnya. Bagaimana strategi Bapak untuk merajut kembali kohesi sosial dan mencegah penggunaan politik identitas dalam kontestasi politik ke depan?"	Kohesi Sosial, Pluralisme, Toleransi, Kewargaan Inklusif, Stabilitas Nasional.	
<b>Ruang Sipil &amp; Partisipasi Publik</b>	"Kebebasan berpendapat, terutama kritik terhadap pemerintah, terasa semakin terancam, salah satunya melalui UU ITE. Apa jaminan yang bisa Bapak berikan untuk melindungi dan memperluas ruang sipil yang bebas dan aman?"	Kebebasan Sipil, Partisipasi Bermakna, Transparansi, Hak Asasi Manusia.	

#### **a. Reformasi Institusional dan Krisis Rule of Law**

Salah satu tema sentral yang hampir pasti mendominasi dialog semacam ini adalah krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi penopang demokrasi. Pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa kemungkinan besar akan menyoroti apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai proses pembusukan institusional (*institutional decay*). Fokus utamanya adalah pada dua lembaga krusial: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diskursus mengenai KPK akan berpusat pada dampak dari Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, yang secara luas dipandang telah melumpuhkan independensi dan efektivitas lembaga tersebut. Pertanyaan mahasiswa kemungkinan akan bersifat tajam dan menuntut komitmen konkret: "Apakah Anda akan membatalkan revisi UU KPK?", "Bagaimana Anda akan memastikan pimpinan KPK diisi oleh figur-figur berintegritas, bukan hasil kompromi politik?". Analisis terhadap respons politisi dalam hal ini akan sangat penting. Apakah respons tersebut menawarkan peta jalan reformasi yang jelas dan terukur, ataukah hanya berupa retorika umum tentang "komitmen pada pemberantasan korupsi" tanpa langkah spesifik? Bahasa yang digunakan apakah defensif terhadap status quo atau progresif menuju restorasi akan mengungkap posisi ideologisnya terhadap isu sentral akuntabilitas.

Demikian pula, diskursus mengenai Mahkamah Konstitusi akan diwarnai oleh putusan-putusan kontroversial yang dianggap sarat dengan intervensi politik, terutama yang berkaitan dengan syarat pencalonan dalam pemilu. Pertanyaan mahasiswa akan menggugat integritas peradilan dan menuntut mekanisme untuk menjaga MK sebagai "penjaga konstitusi" yang imparial. "Langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi proses seleksi hakim konstitusi agar terbebas dari pengaruh politik?".

Konteks yang lebih luas dari perdebatan ini adalah fenomena "otokrasi legalistik" (*autocratic legalism*) atau "*aggrandizement eksekutif*", di mana instrumen hukum dan lembaga negara, yang seharusnya menjadi mekanisme *checks and balances*, justru digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan melemahkan lawan politik [12]. Para mahasiswa, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, secara efektif sedang melakukan perlawanan diskursif terhadap tren tersebut. Mereka menuntut pemulihan prinsip supremasi hukum yang substantif, bukan sekadar hukum sebagai alat kekuasaan. Ini sejalan dengan teori reformasi di negara transisional yang menekankan bahwa reformasi sejati harus membongkar struktur yang memungkinkan penyalahgunaan, bukan hanya mengganti personel. Respons dari Anies Baswedan akan dianalisis untuk melihat sejauh mana visinya sejalan dengan agenda reformasi institusional yang mendalam ini.

#### **b. Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan: Jantung Demokrasi Substansial**

Diskursus dalam dialog ini tidak akan terbatas pada isu-isu kelembagaan politik semata. Ia akan bergerak ke jantung dari demokrasi substansial: keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bagi generasi muda yang mendominasi demografi pemilih, isu-isu ini bersifat sangat personal dan mendesak. Survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) secara konsisten menunjukkan bahwa isu kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja merupakan prioritas tertinggi bagi pemilih muda, jauh melampaui isu-isu politik lainnya [13].

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa UGM kemungkinan besar akan mencerminkan kecemasan ini. Mereka akan menantang narasi-narasi makroekonomi yang hanya berfokus pada angka pertumbuhan PDB. Pertanyaan seperti, "Pertumbuhan ekonomi kita sering kali tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bagaimana Bapak akan mengatasi masalah ketimpangan yang semakin

melebar?", atau "Lulusan universitas semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, apa solusi konkret Anda selain program-program pelatihan yang sudah ada?". Pertanyaan-pertanyaan ini secara implisit menuntut pergeseran paradigma dari sekadar pertumbuhan (*growth*) menuju pembangunan yang inklusif dan distributif (*inclusive and distributive development*), yang merupakan esensi dari demokrasi substansial.

Analisis diskursus akan fokus pada bagaimana sang politisi merespons tuntutan ini. Apakah ia tetap menggunakan retorika pembangunan infrastruktur sebagai jawaban utama, sebuah pendekatan yang menjadi ciri khas pemerintahan sebelumnya? Ataukah ia menawarkan gagasan-gagasan baru yang lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, transisi energi hijau, atau reformasi struktural untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil? Jawaban atas pertanyaan ini akan menunjukkan apakah visi ekonominya mampu menjawab aspirasi substantif dari generasi yang akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Kegagalan sebuah sistem demokrasi untuk memberikan kesejahteraan ekonomi yang merata tidak hanya akan menciptakan masalah sosial, tetapi juga dapat mengikis legitimasi sistem itu sendiri, membuatnya rentan terhadap daya tarik pemimpin populis atau otoriter yang menjanjikan solusi instan.<sup>16</sup>

### **c. Menavigasi Polarisasi Politik dan Politik Identitas**

Isu polarisasi politik yang berbasis pada identitas adalah salah satu luka paling dalam dalam tubuh demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2014 serta 2019 meninggalkan residu perpecahan sosial yang tajam, sering kali dieksploitasi dengan menggunakan sentimen agama dan etnis. Mengingat Anies Baswedan adalah figur sentral dalam kontestasi Pilkada 2017, tema ini kemungkinan besar akan diangkat dalam dialog dengan mahasiswa, yang mewakili generasi yang prihatin dengan dampak destruktif dari polarisasi.

Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul akan bersifat reflektif dan berorientasi ke depan: "Belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya yang sangat memecah belah, bagaimana Bapak akan memimpin sebuah proses rekonsiliasi nasional?", "Apa langkah konkret untuk mencegah politisasi agama dalam pemilu dan kehidupan publik?". Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar tantangan politik, tetapi juga ujian kepemimpinan moral.

Analisis diskursus akan sangat memperhatikan pilihan kata, metafora, dan narasi yang digunakan oleh Anies dalam menjawabnya. Apakah ia akan menggunakan bahasa yang inklusif, merangkul semua kelompok, dan menekankan pada narasi kebangsaan yang pluralis? Ataukah ia akan secara halus tetap mempertahankan basis pemilih identitarian sambil mencoba menarik simpati kelompok moderat? Kemampuannya untuk mengartikulasikan sebuah visi persatuan yang meyakinkan, tanpa terkesan naif atau mengingkari realitas politik yang ada, akan menjadi kunci. Literatur akademis sangat jelas mengenai bahaya polarisasi yang tidak terkelola: ia dapat melemahkan kohesi sosial, menyebabkan kebuntuan kebijakan, mengikis kepercayaan pada institusi, dan bahkan memicu radikalisme dan kekerasan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dialog ini menjadi sebuah panggung penting untuk menguji kapasitas seorang pemimpin dalam menyembuhkan, bukan memperdalam, perpecahan dalam masyarakat.

#### **d. Kualitas Ruang Sipil dan Partisipasi Publik Bermakna**

Tema terakhir yang krusial adalah mengenai kesehatan ruang sipil (*civic space*). Demokrasi yang substantif tidak mungkin terwujud tanpa adanya ruang yang bebas dan aman bagi warga negara untuk berpendapat, mengkritik, berserikat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak aktivis dan pengamat merasakan adanya penyusutan ruang sipil di Indonesia. Salah satu instrumen yang paling sering disorot adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pasal-pasal karetnya kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik.<sup>12</sup>

Mahasiswa, sebagai kelompok yang aktif secara sosial dan digital, sangat merasakan dampak dari fenomena ini. Pertanyaan mereka kemungkinan akan langsung menusuk ke jantung persoalan: "Apakah Bapak berkomitmen untuk merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang sering digunakan untuk kriminalisasi aktivis dan warga biasa?", "Bagaimana cara memastikan bahwa partisipasi anak muda dalam politik tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan?". Tuntutan ini adalah untuk sebuah partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), bukan sekadar mobilisasi elektoral.

Analisis terhadap respons politisi akan mengevaluasi komitmennya terhadap perlindungan dan perluasan kebebasan sipil. Apakah ia melihat kritik sebagai

bagian esensial dari demokrasi yang sehat, ataukah sebagai gangguan terhadap stabilitas? Apakah visinya tentang partisipasi publik melampaui sekadar melibatkan anak muda dalam program-program pemerintah, menuju sebuah model ko-kreasi kebijakan yang lebih otentik? Jawaban-jawaban ini akan dibandingkan dengan kerangka teoretis yang menempatkan masyarakat sipil yang kuat dan ruang publik yang bebas sebagai prasyarat mutlak bagi demokrasi yang terkonsolidasi. Selain itu, isu transparansi dalam proses legislasi, seperti pentingnya *roll-call votes* (pemungutan suara terbuka) di parlemen agar publik dapat mengawasi wakilnya, juga menjadi bagian dari tuntutan akan ruang sipil yang lebih akuntabel, meskipun praktik ini masih jarang dan sering kali strategis, bukan standar.<sup>40</sup> Dialog ini, pada akhirnya, adalah sebuah negosiasi tentang batasan-batasan kebebasan dan makna partisipasi dalam demokrasi Indonesia.

### **3. Meletakkan Dialog dalam Lanskap Politik Pasca-Reformasi dan Pasca-Pemilu 2024**

Untuk memahami sepenuhnya signifikansi dari diskursus yang terjadi dalam dialog di UGM, interaksi tersebut harus ditempatkan dalam dua konteks yang lebih luas: lintasan panjang konsolidasi demokrasi Indonesia sejak 1998, dan konstelasi politik spesifik yang terbentuk pasca-Pemilihan Umum 2024. Isu-isu yang diangkat oleh para mahasiswa bukanlah persoalan baru, melainkan akumulasi dari frustrasi dan tantangan yang muncul dari sebuah proses reformasi yang belum tuntas.

Perjalanan demokrasi Indonesia selama lebih dari dua setengah dekade dapat dilihat sebagai serangkaian fase yang berbeda, masing-masing dengan pencapaian dan tantangannya sendiri. Era Presiden B.J. Habibie membuka gerbang reformasi dengan membebaskan tahanan politik dan menjamin kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan pentingnya pluralisme dan keadilan. Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil menavigasi negara melewati krisis multidimensi dan menjaga stabilitas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin periode yang dianggap sebagai masa pematangan demokrasi, dengan konsolidasi institusional dan pemilu langsung yang berjalan relatif damai. Namun, era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan sebuah ambivalensi: di satu sisi, terjadi pembangunan infrastruktur yang masif dan fokus pada pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, banyak pengamat mencatat adanya kemunduran demokrasi yang signifikan, ditandai dengan pelemahan lembaga pengawas, penyusutan ruang sipil, dan penggunaan hukum untuk tujuan politik.

Dalam konteks historis ini, pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di UGM dapat dibaca sebagai sebuah "tagihan" atas janji-janji Reformasi yang belum terpenuhi. Tuntutan akan supremasi hukum yang sejati, pemberantasan korupsi yang tanpa kompromi, dan perlindungan kebebasan sipil adalah gema dari cita-cita awal 1998 yang terasa semakin jauh dari kenyataan. Dialog tersebut menjadi momen di mana generasi pasca-Reformasi meminta pertanggungjawaban atas warisan yang mereka terima.

Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui pembaruan tesis "ironi keberhasilan" (*irony of success*) yang pernah diajukan oleh Edward Aspinall [14]. Tesis ini pada awalnya menyatakan bahwa keberhasilan awal demokratisasi justru melahirkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Jika diperbarui untuk konteks saat ini, ironi tersebut menjadi semakin tajam. Keberhasilan membangun sistem multipartai yang sangat kompetitif dan sistem pemilu proporsional daftar terbuka justru melahirkan politik berbiaya tinggi, yang pada gilirannya mendorong praktik politik transaksional dan korupsi sebagai cara untuk membiayai kontestasi [15]. Keberhasilan menjamin kebebasan berbicara, yang merupakan tuntutan inti Reformasi, ketika diperkuat oleh penetrasi media sosial, justru menjadi senjata untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian, yang memperdalam polarisasi sosial. Keberhasilan menciptakan lembaga-lembaga pengawas baru yang kuat seperti KPK dan MK justru menjadikan lembaga-lembaga tersebut target utama bagi elite politik yang ingin menghilangkan hambatan bagi kekuasaan mereka. Dengan demikian, tantangan-tantangan yang didiskusikan dalam dialog di UGM bukanlah tanda bahwa Reformasi telah gagal, melainkan merupakan konsekuensi *path-dependent* yang kompleks dari keberhasilan-keberhasilan awalnya. Indonesia kini sedang bergulat dengan dampak institusional dan sosial dari sistem yang dibangunnya sendiri sebuah ironi mendalam yang mendefinisikan lanskap politik kontemporer.

Dialog ini menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam lanskap politik pasca-Pemilu 2024. Hasil pemilu berpotensi menciptakan sebuah konstelasi kekuasaan yang menghadirkan tantangan-tantangan baru bagi demokrasi substantif. Pertama, kemungkinan terbentuknya koalisi pemerintahan super-mayoritas (*super-majority coalition*) di parlemen dapat semakin melemahkan fungsi pengawasan legislatif, membuat mekanisme *checks and balances* menjadi tidak efektif. Dalam situasi seperti ini, peran oposisi di luar parlemen termasuk gerakan mahasiswa, OMS, dan intelektual publik

menjadi semakin vital sebagai satu-satunya sumber kritik dan pengawasan yang signifikan [4].

Kedua, pemerintahan baru akan dihadapkan pada dilema antara kontinuitas dan perubahan. Di satu sisi, ada tekanan untuk melanjutkan proyek-proyek strategis dari pemerintahan sebelumnya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang memerlukan sumber daya dan fokus politik yang besar [16]. Di sisi lain, ada tuntutan mendesak, seperti yang disuarakan dalam dialog, untuk mengatasi masalah-masalah struktural yang telah lama terabaikan, seperti reformasi hukum, ketimpangan ekonomi, dan perbaikan kualitas pendidikan. Bagaimana pemerintahan baru menyeimbangkan dua agenda ini akan menentukan prioritas dan arah kebijakan mereka.

Ketiga, dialog ini merupakan penanda dari pergeseran generasi yang sedang berlangsung dalam politik Indonesia. Pemilih muda (Generasi Z dan Milenial) kini merupakan kelompok mayoritas dalam daftar pemilih [13]. Berbeda dengan generasi sebelumnya, mereka cenderung tidak memiliki loyalitas partai yang kaku dan lebih berorientasi pada isu (*issue-based*).

Mereka adalah *digital natives* yang mengonsumsi dan memproduksi informasi politik melalui platform yang berbeda, menuntut gaya komunikasi politik yang lebih otentik dan transparan. Tuntutan mereka akan substansi, akuntabilitas, dan keadilan, sebagaimana diekspresikan oleh mahasiswa UGM, akan menjadi kekuatan politik yang semakin dominan dan tidak bisa diabaikan oleh elite politik mana pun di masa depan. Tantangan bagi lembaga seperti KPU adalah bagaimana secara efektif melibatkan demografi ini, yang sering kali apatis terhadap politik formal namun aktif dalam diskursus digital, dan bagaimana menavigasi diskursus tentang modernisasi pemilu, seperti pro dan kontra penggunaan *e-voting* [17].

#### **4. Arah Baru Diskursus Politik dan Peran Generasi Muda**

Analisis terhadap dialog antara Anies Baswedan dan mahasiswa UGM, yang diproyeksikan melalui lensa tantangan demokrasi kontemporer Indonesia, menghasilkan sebuah sintesis yang kuat. Dialog ini berfungsi lebih dari sekadar peristiwa politik sesaat; ia adalah sebuah ilustrasi tajam mengenai persimpangan jalan kritis yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Secara gamblang, interaksi ini memanggungkan benturan antara dua paradigma: di satu pihak, sebuah diskursus politik elite yang sering kali masih terpaku pada legitimasi prosedural dan manuver kekuasaan, dan di pihak lain, sebuah

tuntutan sosial yang semakin menguat, terutama dari generasi muda, untuk pencapaian hasil-hasil yang substantif. Dialog ini mengkristalkan kegelisahan publik terhadap sebuah sistem yang mahir menyelenggarakan pemilu tetapi gagap dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan akuntabilitas.

Implikasi dari temuan ini bagi masa depan demokrasi Indonesia sangatlah mendalam. Jurang yang terus melebar antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial merupakan ancaman paling fundamental bagi proses konsolidasi demokrasi di negara ini. Kegagalan yang berkelanjutan dalam menangani keluhan-keluhan substantif seperti korupsi yang merusak sendi-sendi negara, ketidaksetaraan yang mengancam kohesi sosial, dan penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah akan terus menggerogoti fondasi legitimasi sistem demokrasi. Hal ini tidak hanya akan menyuburkan sinisme dan apatisme politik, tetapi juga akan terus memicu polarisasi yang merusak, menciptakan lahan subur bagi narasi-narasi populis dan identitarian yang menawarkan solusi simplistis. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat sistem politik Indonesia rentan terhadap erosi lebih lanjut dan bahkan regresi menuju bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih otoriter.

Namun, di tengah tantangan yang suram tersebut, dialog ini juga menyoroti sumber harapan yang paling potensial bagi pembaruan demokrasi: peran generasi muda yang terlibat dan kritis. Mahasiswa di UGM, sebagai representasi dari kelompok ini, menunjukkan bahwa idealisme dan tuntutan akan akuntabilitas belum padam. Kesiediaan mereka untuk terlibat dalam perdebatan yang serius, menantang para pemimpin dengan pertanyaan-pertanyaan berbasis data dan prinsip, serta memfokuskan perhatian pada isu-isu kebijakan yang substantif, merupakan penawar yang paling manjur terhadap pembusukan demokrasi. Mereka membuktikan bahwa partisipasi politik bisa lebih dari sekadar memberikan suara setiap lima tahun, melainkan sebuah proses pengawasan dan penuntutan pertanggungjawaban yang berkelanjutan. Masa depan demokrasi Indonesia, pada akhirnya, akan sangat bergantung pada apakah sistem politik mampu menciptakan saluran-saluran yang bermakna untuk menyalurkan energi kritis ini, atau sebaliknya, membiarkan frustrasi generasi ini mengeras menjadi apatisme total atau bahkan radikalisme.

Sebagai penutup, artikel ini menyerukan perlunya sebuah "hijrah" yang mendesak dalam diskursus politik Indonesia. Sudah saatnya perdebatan publik bergerak melampaui politik kepribadian, sensasi sesaat, dan eksploitasi identitas yang memecah belah.



Indonesia membutuhkan sebuah diskursus politik baru yang lebih matang, berbasis bukti, dan berani menghadapi tantangan-tantangan substantif yang nyata: bagaimana membangun institusi yang bersih, menciptakan ekonomi yang adil, merawat tenun kebangsaan yang beragam, dan menjamin kebebasan bagi setiap warganya. Ini adalah sebuah perdebatan yang berat dan kompleks, tetapi, seperti yang telah ditunjukkan oleh para mahasiswa di UGM, ini adalah perdebatan yang harus dimulai sekarang. Mereka telah melemparkan gagasan ke ruang publik; tantangannya kini adalah apakah para elite politik dan masyarakat luas bersedia untuk menyambut dan melanjutkannya.

### **C. KESIMPULAN**

Dialog antara Anies Baswedan dan mahasiswa UGM merefleksikan ketegangan mendasar dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi: capaian prosedural yang kokoh belum diimbangi dengan kualitas substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Analisis diskursus menunjukkan empat pilar utama yang menjadi fokus tuntutan mahasiswa: (1) Reformasi Institusional dan Penegakan Hukum: Mahasiswa menuntut pemulihan independensi KPK dan Mahkamah Konstitusi serta reformasi mekanisme seleksi dan pengawasan lembaga penegak hukum untuk menjamin supremasi hukum yang efektif. (2) Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial: Pertanyaan-pertanyaan kritis menyerukan pergeseran dari target pertumbuhan makro menuju kebijakan inklusif yang mengatasi ketimpangan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. (3) Penanganan Polarisasi dan Politik Identitas: Mahasiswa menguji visi persatuan nasional dengan meminta strategi konkret rekonsiliasi dan pencegahan politisasi agama serta etnis, menekankan pentingnya kohesi sosial dan narasi kebangsaan yang inklusif. (4) Perluasan Ruang Sipil dan Partisipasi Bermakna: Tuntutan merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE dan membangun mekanisme partisipasi publik yang autentik mencerminkan keinginan generasi muda untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi aktor pengawasan kebijakan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dialog ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia kini berada pada persimpangan antara mempertahankan legitimasi prosedural dan memenuhi janji substantif Reformasi 1998. Generasi muda, yang tumbuh di bawah sistem demokrasi ini, berperan sebagai katalisator perubahan mereka memaksa elite politik untuk menjawab

secara konkret soal akuntabilitas, keadilan, dan kebebasan sipil. Keberhasilan konsolidasi demokrasi jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan lembaga negara untuk merespon tuntutan substantif ini dan menciptakan saluran dialog yang bermakna, sehingga demokrasi tidak hanya berjalan sebagai ritual, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. R. Saputra and N. Hilyatunisa, "Redefining Executive Power: Evolution of Presidential and Vice Presidential Roles in Indonesia's Post-Amendment Constitutional System," *Lit. Int. Sci. Journals Soc. Educ. Humanit.*, vol. 4, no. 2, pp. 440–451, 2025, doi: 10.56910/literacy.v4i2.2697.
- [2] M. Repansah, "Penerapan Sistem Demokrasi Konstitusional: Indikator dan Hambatan dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Staatsr. J. Huk. Kenegaraan dan Polit. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 329–351, Jun. 2025, doi: 10.14421/ppky3465.
- [3] Y. I. Mahendra, "Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial," *Paradig. POLISTAAT J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 27–47, Jun. 2021, doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214.
- [4] E. Warburton, "The Politics of Indonesia," in *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, Oxford University Press, 2025. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.2210.
- [5] M. Huda, M. Muharam, M. A. Affandi, A. S. Adi, S. Swarizona, and E. S. Hermawan, "Indonesia's Struggle For Democratic Resilience: Issues and Institutional Reforms," *Int. J. Law Soc.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–153, Feb. 2025, doi: 10.62951/ijls.v2i2.379.
- [6] M. B. Ulum, "The Judicial Commission and Institutional Challenges in the Appointment of Judges in Indonesia's Reform Framework," *J. Judic. Rev.*, vol. 27, no. 1, pp. 303–328, Jun. 2025, doi: 10.37253/jjr.v27i1.10486.
- [7] M. M. B. Yasar, M. F. Arighi, S. N. Falah, R. M. Ramdhan, and A. Septiadi, "Peran Influencer Terhadap Pemilihan Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024," *J. Law, Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 5, pp. 981–995, Jul. 2024, doi: 10.54957/jolas.v4i5.956.
- [8] B. Elfudllatsani, Isharyanto, and A. Riwanto, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 7, no. 1, p. 52, Apr. 2019, doi: 10.20961/hpe.v7i1.29190.
- [9] A. Hariri and Samsul Arifin, "Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators," *Indones. Law Reform J.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–24, Feb. 2025, doi: 10.22219/ilrej.v5i1.38332.
- [10] M. Mietzner, "Indonesia's democratic stagnation: anti-reformist elites and resilient civil society," *Democratization*, vol. 19, no. 2, pp. 209–229, Apr. 2012, doi: 10.1080/13510347.2011.572620.
- [11] D. Acemoglu, G. Egorov, and K. Sonin, "Institutional change and institutional persistence," in *The Handbook of Historical Economics*, Elsevier, 2021, pp. 365–389. doi: 10.1016/B978-0-12-815874-6.00021-6.
- [12] M. S. Bin-Armia, M. S. Armia, F. F. Rifqy, H. Tengku-Armia, and C. R. Mustika, "From Constitutional-Court To Court Of Cartel: A Comparative Study Of Indonesia And

- Other Countries," *PETITA J. Kaji. ILMU Huk. DAN SYARIAH*, vol. 9, no. 2, pp. 457–479, Sep. 2024, doi: 10.22373/petita.v9i2.437.
- [13] A. Fernandes, E. G. Suryahudaya, V. D. Perkasa, and N. D. Fahrizal, "Rilis Survei Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi," 2024. [Online]. Available: <https://csis.or.id/publication/rilis-survei-pemilih-muda-dan-pemilu-2024-dinamika-dan-preferensi-sosial-politik-pascapandemi/>
- [14] E. Aspinall, "Indonesia: The Irony of Success," *J. Democr.*, vol. 21, no. 2, pp. 20–34, Apr. 2010, doi: 10.1353/jod.0.0157.
- [15] B. Argoebie, Cindy, Muhammad Raffata Umar, and Lia Wulandari, "An evaluation of Indonesia's open proportional electoral system and its impact on party fragmentation in the 2024 general election," *J. Polit. Indones. (Indonesian J. Polit.*, vol. 11, no. 1, pp. 79–95, Jun. 2025, doi: 10.20473/jpi.v11i1.71891.
- [16] I. M. Halmadiningrat and A. Firdharizki, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 333–374, Nov. 2024, doi: 10.38011/jhli.v9i2.601.
- [17] M. R. Saputra and W. Setiadi, "Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections," *Int. J. Law Soc.*, vol. 1, no. 3, pp. 94–112, May 2024, doi: 10.62951/ijls.v1i3.65.